

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pengetahuan di masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dewasa ini menyebabkan tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dalam membuat suatu laporan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, akuntabilitas merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi demi terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan pemerintah daerah melalui upaya mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dituntut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan yang dapat dilaporkan kepada DPRD terkait hasil pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan evaluasi untuk kinerja pemerintah di tahun berikutnya. (Hasibuan, 2018:17)

Berdasarkan informasi pada laman *website* (www.bpk.go.id) , pengelola keuangan negara dan daerah dituntut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Seperti yang dikatakan Anggota V BPK, “Masyarakat semakin dewasa dan paham, bahwa uang yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah merupakan uang yang diamanatkan kepada pengelola pemerintahan, sehingga keterbukaan penggunaan dana merupakan sebuah keharusan”. Peran pemerintah dalam mengelola keuangan daerah merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban yang dilakukan instansi, dimana pihak yang berkepentingan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan dan kerjakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Organisasi sektor publik

ialah organisasi yang menggunakan sumber dana dari publik secara ekonomi, efisien dan efektif sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Agar terciptanya pengelolaan APBD yang akuntabel dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penerapan konsep *value for money*, penyajian dan aksesibilitas terhadap laporan keuangan serta sistem pengendalian intern yang baik.

Akuntabilitas publik bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis (*spending less*), efisiensi (*spending well*), dan efektivitas (*spending wisely*) (Mardiasmo, 2009:131). Pemerintah menerapkan konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya sebagai upaya pemerintah mengatasi isu mengenai sektor publik sebagai sumber kebocoran dana, pemborosan dan institusi yang selalu merugi. (Hulu, 2020:21). *Value for money* digunakan sebagai konsep pengukuran untuk mencapai akuntabilitas publik dan kinerja sektor publik yang baik. Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan pengukuran *value for money* yang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pengukuran Value For Money Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018, 2019, dan 2020

<i>Value For Money</i>	Tahun		
	2018	2019	2020
Ekonomis	91%	91%	93%
Efisiensi	74%	70%	74%
Efektivitas	99%	94%	93%

Sumber : Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa rasio ekonomis pada tahun 2018 sampai 2020 dalam pemeliharaan sumber daya masih dikatakan ekonomis, pada tahun 2018 tingkat pencapaian 91%, pada tahun 2019 tingkat pencapaian 91%, dan pada tahun 2020 tingkat pencapaian 93%. Karena persentase rasio ekonomisnya masih dibawah 100%, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong ekonomis dalam pemeliharaan sumber dayanya.

Rasio efisiensi pada tahun 2018 sampai 2020 dalam penggunaan dana masyarakat harus menghasilkan *output* yang maksimal. Pada tahun 2018 tingkat pencapaian 74% dikatakan efisien, pada tahun 2019 tingkat pencapaian 70% dikatakan efisien, dan pada tahun 2020 tingkat pencapaian 74% dikatakan efisien. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menunjukkan efisien dalam penggunaan dananya, namun masih terlihat mengalami fluktuasi antara tahun 2018 sampai 2020.

Sedangkan, rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sampai 2020 bahwa anggaran harus mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 tingkat pencapaian 99% dikatakan efektif, pada tahun 2019 tingkat pencapaian 94% dikatakan efektif, dan tahun 2020 tingkat pencapaian 93% dikatakan efektif. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menunjukkan efektif dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, namun masih terlihat mengalami penurunan rasio setiap tahunnya. Pengukuran *value for money* sehubungan dengan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal pertanggungjawaban yang berkaitan pertimbangan tujuan yang telah ditetapkan tidak sesuai, akibatnya dalam pemeliharaan dan penggunaan sumber daya dalam kuantitas dan kualitas kurang optimal.

Saat ini, wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan informasi pada laman *website* (www.bpkp.go.id), salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal yang dalam hal ini ialah BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menjamin akuntabilitas publik, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, agar dapat memenuhi syarat laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus mengandung karakteristik andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang baik mampu menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh para pengguna informasi, disajikan secara lengkap, tepat waktu, memiliki

kesesuaian informasi transaksi, informasi yang disajikan haruslah dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan yang akan datang serta dapat dipahami. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas publik, dalam hal ini pengguna informasi dalam laporan keuangan akan memperoleh informasi yang berkualitas (Wahida, 2015:22).

Aksesibilitas merupakan penunjang untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal mengetahui laporan keuangan pemerintah, di mana pemerintah memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk dapat melihat dan meninjau laporan keuangan pemerintah tiap tahunnya agar masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan pemerintah sehingga masyarakat sendiri dapat menilai mana laporan keuangan yang benar dan mana yang salah. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. (Mulyana, 2006). Namun nyatanya, tidak semua OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan informasi publik, salah satunya mengenai laporan keuangan yang dapat diakses secara terbuka melalui laman *website* masing-masing OPD. Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada oleh peneliti pada laman *website* OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hanya ada 3 dari 39 OPD Pemerintah Sumatera Selatan yang menyajikan laporan keuangannya secara terbuka di laman *website* OPD, diantaranya yang terdapat pada data tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Daftar OPD Yang Menyajikan Laporan Keuangan di Website

No	Nama OPD
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Data yang diolah (2022)

Pemerintah yang belum melaksanakan akuntabilitas secara maksimal untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini disebabkan laporan keuangan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang

tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan. Masyarakat menuntut adanya aksesibilitas yang mudah dan terpercaya. (Hasibuan, 2018:18).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, BPK mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 12 temuan pemeriksaan, dengan rincian terdapat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Temuan BPK Terkait Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

No	Butir Temuan
1	Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah Belum Optimal
2	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp322.862.360,00
3	Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi pada Lima OPD sebesar Rp157.687.000,00
4	Pengelolaan dan Penggunaan Kupon BBM pada Tiga OPD Tidak Memadai dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja BBM/Gas dan Pelumas Sebesar Rp91.712.800,00
5	Bukti Pertanggungjawaban Biaya Kegiatan Reses Tidak Sesuai dengan Kondisi yang Sebenarnya Sebesar Rp376.477.474,00
6	Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal Pada Enam OPD sebesar Rp5.500.928.568,92 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan sebesar Rp997.441.954,48
7	Perencanaan Belanja Hibah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Belum Sesuai Ketentuan
8	Kelebihan Pembayaran Pengadaan Sembako untuk Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Sebesar Rp641.322.643,50
9	Kelebihan Pembayaran Pajak Belanja Tidak Terduga pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp90.465.548,00
10	Penatausahaan Persediaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Tertib
11	Penyajian Investasi Permanen pada PD Prodexim dan PD Industri Grafika

	Meru Tidak Dapat Dinilai Kewajarannya
12	Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Belum Tertib

Sumber : *LHP LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020*

Oleh sebab itulah, walaupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah meraih opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 7 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2020, tetapi tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan ataupun kekeliruan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 3 No. 60 tahun 2008, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dapat mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan serta penyimpangan dana dan anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan. (Pramudita, 2017:23).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Value For Money* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah *Value For Money*, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama

berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu pada *Value For Money*, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi Sumatera Selatan, dimana masing-masing sampel OPD tersebut ialah Kepala OPD, Sekretaris OPD, Kepala Bidang Keuangan pada OPD dan staf yang melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Value For Money* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Value For Money*, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi informasi bagi masyarakat luas.